

Analisis penerapan kebijakan pembatasan biaya bunga sebagai upaya pencegahan praktik Thin Capitalization di Indonesia = Implementation of interest expense limitation policy as an initiative to prevent Thin Capitalization practices in Indonesia

Felix Bahari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920572395&lokasi=lokal>

Abstrak

Saat ini Indonesia menerapkan dua metode kebijakan pembatasan biaya bunga. Pertama, metode DER yang diatur dalam PMK 169/2015, Kedua, metode ESR yang diperkenalkan melalui amandemen Pasal 18 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dari metode DER dan metode ESR beserta peluang dan tantangan dalam rencana implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki dua temuan utama. Pertama, selain aturan rasio pada metode DER, terdapat ketentuan tambahan sebagai penyempurna kebijakan seperti pengecualian industri tertentu, cakupan serta definisi utang dan modal, serta aturan penggunaan saldo rata-rata bagi keduanya. Adapun metode DER diterapkan untuk mencegah preferensi pelaku usaha di Indonesia dalam menggunakan pembiayaan melalui pinjaman, terutama sumber utang luar negeri. Pada metode ESR, selain aturan fixed ratio interest-to-EBITDA, terdapat beberapa ketentuan tambahan sebagai penyempurna kebijakan termasuk rasio grup, carry forward dan/atau carry back, de minimis threshold, serta ketentuan spesifik untuk industri tertentu. Sebagai catatan, metode ESR dianggap sebagai metode yang lebih efektif dalam memitigasi skema penghindaran pajak melalui konsolidasi laba rugi grup perusahaan dibandingkan dengan metode DER. Kedua terdapat tiga peluang dalam rencana implementasi penerapan kebijakan ESR. Pertama, Indonesia akan memiliki kebijakan yang dapat memitigasi skema pajak melalui konsolidasi laba rugi grup perusahaan. Kedua, kebijakan ESR dapat dianggap lebih mengakomodasi motif keadilan. Ketiga, Indonesia berpeluang memiliki kebijakan yang cenderung rendah pada biaya kepatuhan akibat dari adanya de minimis rule. Selain itu, terdapat dua tantangan yang dapat yang berpotensi timbul sehubungan dengan rencana implementasi penerapan kebijakan ESR. Pertama, adanya isu volatilitas pada laporan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai EBITDA. Kedua, adanya tantangan dalam perumusan aturan spesifik dalam industri tertentu akibat setiap sektor industri memiliki dinamika operasional dan struktur keuangan yang berbeda.Indonesia currently applies two methods of interest expense limitation policy. First, the DER method regulated in PMK 169/2015, Second, the ESR method introduced through the amendment of Article 18 paragraph (1) of the UU PPh s.t.t.d. UU HPP. This study purposes to analyze the application of the DER method and the ESR method along with the opportunities and challenges in the implementation plan. This research uses a qualitative approach, and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. This research has two main findings. First, in addition to the ratio rules in the DER method, there are additional provisions as policy enhancements such as the exclusion of certain industries, the scope and definition of debt and capital, and the rules for using average balance for both. The DER method is applied to prevent the preference of Indonesia's businesses in using financing through loans, especially foreign debt sources. In the ESR method, in addition to the fixed interest-to-EBITDA ratio rule, there are several additional provisions as policy enhancements including group ratio, carry forward and/or

carry back, de minimis threshold, and specific provisions for certain industries. For the record, the ESR method is considered a more effective method in mitigating tax avoidance schemes through consolidation of group companies' profit and loss compared to the DER method. Second, there are three opportunities in the implementation plan of the ESR policy implementation. First, Indonesia will have a policy that can mitigate tax schemes through consolidation of group companies' profit and loss. Second, the ESR policy can be considered as more accommodating to the fairness motive. Third, Indonesia is likely to have a policy that tends to be low on compliance costs due to the de minimis rule. In addition, there are two challenges that could potentially arise in connection with the implementation plan of the ESR policy. First, there is the issue of volatility in the company's financial statements that can affect the value of EBITDA. Second, there are challenges in formulating specific rules in certain industries due to each industry sector having different operational dynamics and financial structures.